

**PERANAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN EKSTRAUNIVERSITER  
SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA DALAM  
MENUMBUHKAN DAN MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK  
WARGA NEGARA INDONESIA**

**(Studi Deskriptif terhadap Organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI  
Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia)**

**Aris Riswandi Sanusi**

***e-mail: [arisriswandisanusi@yahoo.com](mailto:arisriswandisanusi@yahoo.com)***

**ABSTRACT**

*Indonesia is one of democratic state which exposed to low levels of citizen participation. But actually, participation is a key concept that must be owned by citizens in a democracy state. Therefore, we need political education as an effort to create citizens who are able to participate with responsibility. This is in accordance with the opinion of Hajer, which states that political education is a form of human effort to be a responsible participant in politics, so that people know about their political rights (Brownhill and Smart in Elly Hasan Sadeli, et al, 2009:19). The political education among college students organized for young people through the organization such as HMI, KAMMI and GMNI.*

**Keywords: *Political Education, Political Participation***

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang dihadapkan pada rendahnya tingkat partisipasi warga negaranya. Padahal partisipasi merupakan konsep utama yang harus dimiliki warga negara dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan politik sebagai upaya untuk menciptakan warga negara yang mampu berpartisipasi dengan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pendapat Hajer yang menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya (Robert Brownhill dan Patricia Smart dalam Elly Hasan Sadeli, dkk, 2009:19). Adapun pendidikan politik tersebut diantaranya diselenggarakan bagi mahasiswa sebagai generasi muda melalui organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI.

**Kata kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi Politik**

**PENDAHULUAN**

Dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (3) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sudah sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia harus memprioritaskan jalannya pendidikan di negara Indonesia ini, karena pendidikan adalah suatu tuntutan untuk menciptakan warga negara yang baik dan paham akan segala hal yang harus dilakukan untuk menciptakan negara yang sejahtera. Untuk itu, perlu adanya pemahaman tentang pendidikan itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan ini sebagai usaha untuk menciptakan manusia yang utuh dalam artian memiliki pemahaman penuh terhadap apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Pendidikanlah yang menentukan kualitas warga negara yang menentukan jalannya hidup suatu negara. Berlangsungnya pendidikan dapat terjadi pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, baik secara disengaja ataupun tidak. Terjadinya proses pendidikan dalam persekolahan diklasifikasikan dalam tingkatan-tingkatan dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat pemahaman warga negara.

Mahasiswa merupakan bagian elemen penting yang membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan politik bagi warga negara. Hal tersebut karena mahasiswa sendiri memiliki beberapa peran seperti yang diungkapkan purnama (2008: 1) yaitu antara lain “sebagai *iron stock*, sebagai *guardian of value*, dan sebagai *agent of change*”. Peran mahasiswa sebagai “*iron stock*” yaitu mahasiswa diharapkan sebagai manusia tangguh untuk masa depan. Sebagai “*guardian of value*”, mahasiswa berperan sebagai penjaga keutuhan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Peran lainnya yaitu sebagai “*agent of change*”, mahasiswa mendapat tugas sebagai agen pembawa perubahan bagi masyarakat.

Peran mahasiswa sangat diperlukan bagi negara Indonesia yang sampai kini terus diselimuti berbagai permasalahan, seperti masalah partisipasi politik masyarakat. Sebagai cerminan, dapat dilihat dari sejarah perjuangan para pemuda yang dimotori oleh para mahasiswa dalam upaya merebut kemerdekaan dan pascakemerdekaan, seperti perjuangan Ir. Soekarno dan Moch. Hatta yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama negeri ini. Perjuangan mereka sangatlah besar sampai bisa memberikan motivasi pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perjuangan merebut kemerdekaan.

Peran mahasiswa ini didasari atas perlunya kesadaran masyarakat bagi dinamisme kehidupan Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Menurut Darmawan (2008:123) :

Demokrasi itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” atau “*kratien*” yang berarti kekuasaan. Dalam bahasa yang populer, Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah “*the government from the people, by the people, and for the people*” yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kehidupan demokrasi di Indonesia ini tercermin dalam dasar negara yaitu Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Bentuk pemerintahan demokrasi ini, rakyat atau warga negara sangatlah vital peranannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya, suara rakyat menentukan kelangsungan hidup suatu negara. Menurut Macridis dalam Suhelmi (2007:30) :

Negara demokrasi ini dalam pandangan Pericles memiliki beberapa kriteria yaitu 1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat secara penuh dan langsung; 2) kesamaan dalam hukum, pluralism; 3) penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, pandangan; dan 4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.

Selain sebagai negara demokrasi, Indonesia termasuk dalam kategori negara yang berkembang. Dalam sebuah negara berkembang, diperlukan partisipasi langsung dari warga negara untuk dapat mencapai tujuan negara ke arah yang lebih maju. Menurut Huntington dan Nelson (Budiardjo, 1982:2):

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dalam negara demokrasi dan sebagai negara berkembang, seperti Indonesia, diperlukan partisipasi penuh dari masyarakat dalam menjalankan, mempengaruhi, dan terlibat langsung dalam roda pemerintahan. Namun realita saat ini, tingkat partisipasi politik warga negara Indonesia semakin menurun saja. Hal ini bisa dilihat dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei dalam sebuah pemilihan umum yang menyatakan tingkat golongan putih (golput) semakin bertambah dalam setiap pemilihan umum.

Melihat kasus seperti ini, sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu dengan memberikan pemahaman politik bagi masyarakat melalui pendidikan politik. Dalam buku *political education* dari Robert Brownhill dan Patricia Smart dalam Sadeli (2009: 19), "Hajer menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya". Senada dengan pendapat Hajer, Kartono (2009: 64) menyebutkan bahwa:

Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Satu diantara sarana terjadinya proses pendidikan politik khususnya bagi kalangan mahasiswa yaitu melalui organisasi kemahasiswaan. Sangat penting sekali peran dari organisasi kemahasiswaan ini bukan hanya sebagai ladang ilmu politik yang sifatnya teoretis, namun organisasi semacam ini merupakan sarana pendidikan politik yang sifatnya praksis. Kaitannya dengan pendidikan politik pada mahasiswa, Suparman seperti yang dikutip dalam Mubarok (2008: 63) menyebutkan:

Pendidikan politik berperan mensosialisasikan nilai-nilai politik yang dikandung sistem politik yang ideal. Melalui ini mahasiswa akan mempunyai standar penilaian terhadap sebuah sistem politik, dimana secara formal di tingkat tinggi yang memiliki bobot paling besar tentang materi pendidikan politik; pendidikan Pancasila. Untuk itu, pendidikan politik senantiasa bermuatan nilai-nilai yang diharapkan oleh sebuah sistem politik

yang ideal, sehingga mereka dapat menginternalisasikannya dan kepribadiannya. Dengan demikian, hasil dari penginternalisasiannya itu akan mendorong dan melahirkan tingkah laku politik yang mendukung sistem politik yang dicita-citakan.

Pendidikan politik dalam organisasi kemahasiswaan ini sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menjadi pelaku politik yang diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang baik. Selain itu, dapat membawa masyarakat secara umum untuk menciptakan sistem politik seperti itu.

Hal yang diharapkan dengan adanya pendidikan politik dalam organisasi-organisasi di kemahasiswaan yaitu dapat menumbuhkan partisipasi dan sosiologi politik bagi mahasiswa. Selain itu, dengan julukan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai *agent of change*, mahasiswa bisa memberikan perubahan bagi perilaku politik masyarakat agar memiliki kesadaran politik dan mampu menggunakan hak dan kewajiban politiknya dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk meneliti proses pendidikan politik dalam dunia organisasi kemahasiswaan, terlebih pada organisasi kemahasiswaan ekstrakampus atau perguruan tinggi yang dianggap sangat berpengaruh besar bagi dunia perpolitikan di Indonesia.

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Program apa saja yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia?
2. Bagaimana kurikulum pengaderan HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia?
3. Bagaimana tindak lanjut (*follow up*) dari proses pendidikan politik organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap anggota yang telah lulus dalam bidang akademik (alumni)?
4. Bagaimana hambatan yang dihadapi organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam melaksanakan proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia?
5. Bagaimana solusi yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap hambatan yang dihadapi dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan pokok dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui program-program yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui kurikulum penkaderan HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia?

3. Untuk mengetahui tindak lanjut (*follow up*) dari proses pendidikan politik organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI terhadap anggota yang telah lulus dalam bidang akademik (alumni).
4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam melaksanakan proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti mengambil pendekatan ini berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pendidikan terjadi dalam organisasi untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik. Sehingga peneliti memerlukan pengkajian dan memperoleh gambaran yang mendalam.

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Hal ini untuk menggambarkan proses pendidikan politik dalam organisasi dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga Negara Indonesia khususnya di kalangan mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan untuk mengetahui gambaran dari permasalahan yang terjadi secara mendalam, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan dan angka statistik.

Subjek penelitian ini meliputi beberapa pihak yaitu ketua organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI dan pengurus dari masing-masing organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI komisariat UPI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Validitas penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik penelitian. Adapun analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dengan tahapan data reduction, data display, dan conclusion drawing / verification.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Program yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia**

Sebagai satu diantara organisasi politik mahasiswa, organisasi-organisasi ekstrakampus seperti HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI menyadari betul bahwa perlu adanya suatu pendidikan politik untuk menumbuhkan pemahaman politik mahasiswa, baik kadernya maupun bagi mahasiswa pada umumnya. Oleh karena itu, pendidikan politik merupakan suatu hal yang harus diselenggarakan organisasi-organisasi tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi ini lebih beraneka ragam seperti yang dilaksanakan oleh GMNI biasanya dalam bentuk diskusi dan kajian isu-isu kampus dan politik kenegaraan, seminar, *roadshow* alumni dan selanjutnya turun menyikapi isu-isu kampus maupun isu politik kenegaraan baik dalam bentuk aksi demonstrasi maupun propaganda. Sebagai organisasi politik wajib

adanya program untuk menumbuhkan pemahaman politik bagi kader. Namun, organisasi ini berbeda dengan partai politik. Partai politik lebih pada politik praktis, namun organisasi ini lebih pada politik nilai yang berasaskan ideologi. Nilai inilah yang membedakan organisasi GMNI dengan partai politik. Organisasi yang berasaskan pada politik nilai akan mengedepankan nilai-nilai dalam bertindak, berbeda dengan partai politik yang bisa menghalalkan segala cara dalam tindakan politiknya.

Pelaksanaan pendidikan politik di HMI lebih bersifat eksplisit, namun secara implisit banyak sekali kegiatan yang berkaitan erat dengan pendidikan politik itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi baik di HMI maupun organisasi-organisasi ekstrakampus lainnya biasanya diskusi dan kajian merupakan satu diantara bentuk rutinitas dan kewajiban organisasi untuk menumbuhkan pemahaman politik kader. Masalah aksi demonstrasi adalah sunah hukumnya karena aksi hanya sebatas penunjang pemahaman politik kader.

Kegiatan pendidikan politik di KAMMI selain dalam bentuk kajian, diskusi, dan aksi, satu diantara kegiatan yang terlihat mencolok dibandingkan organisasi ekstra lainnya adalah kegiatan sekolah politik (*politic institute/PI*). Mengenai tujuan adanya pendidikan politik dalam organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI, semua narasumber memiliki pandangan yang sama yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman politik kader juga untuk menumbuhkan minat politik mahasiswa. pendidikan politik sangat dibutuhkan untuk menciptakan kader yang melek terhadap politik tidak apatis terhadap politik. Pendidikan politik ini ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa yang siap menjadi agen perubahan di masyarakat.

## **2. Kurikulum pengaderan HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia**

Pengaderan formal meliputi Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB), Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD), Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM), dan Kaderisasi Tingkat Pelopor (KTP). Sedangkan pengaderan nonformal meliputi kajian-kajian dan diskusi. Sebagai calon kader baru harus mengikuti pengaderan yaitu PPAB. Dalam pelaksanaan PPAB ini, biasanya dilaksanakan selama tiga hari dengan materi-materi dasar tentang ke-GMNI-an, ideologi, dan kemahasiswaan. Namun, setelah mengikuti PPAB tersebut tidak serta merta lulus dan dikukuhkan menjadi kader namun selanjutnya ada penjarangan terlebih dahulu para peserta PPAB tersebut yang dilakukan dengan mewawancarai setiap peserta. Penjarangan ini ditujukan untuk menanyakan kesiapan dan profil peserta apakah ada keterikatan dengan organ lain atau tidak, karena banyak orang yang lacur organisasi. Peserta yang memiliki keterikatan atau masih menjadi anggota resmi dari organisasi ekstra lainnya tidak akan langsung diterima sesuai dengan kesepakatan Cipayung. Calon kader akan lulus menjadi kader GMNI ini apabila membawa surat pengunduran diri atau memperlihatkan sikap bahwa dia telah mengundurkan diri dari organisasi asalnya dan memiliki kesungguhan untuk mengikuti GMNI. Hal ini dilakukan satu persatu pada peserta tanpa diketahui oleh peserta lainnya. Setelah hal tersebut dilakukan maka peserta yang lulus akan langsung dikukuhkan menjadi anggota resmi GMNI. Setelah adanya pengaderan tahap PPAB tersebut, G2 mengatakan

kemudian dengan syarat tertentu dapat mengikuti KTD, KTM, dan KTP. KTD biasa dilakukan oleh cabang, setelah itu KTM yang dilakukan Korda yang bekerja sama dengan presidium dan dilakukan cabang setempat, tapi yang berperan adalah korda bekerja sama dengan presidium. Tahapan pengaderan ini dilakukan selama satu bulan yaitu tujuh hari di kelas dan sisanya di lapangan. KTM ini sesuai dengan indikator-indikator dalam silabus. Sedangkan KTP dilakukan kerjasama korda-korda dengan presidium. Ada seleksi bagi kader-kader untuk mengikuti KTP ini. Ada kesinambungan antara keempat fase pengkaderan tersebut.

Sementara itu, pengaderan yang dilakukan HMI menurut H3 pengaderan di HMI dikenal ada tiga tahapan pengaderan, yaitu Latihan Kader (LK) 1, 2, dan 3. Pengaderan tahap pertama untuk seleksi calon kader baru yaitu LK1. Sebelum calon kader mengikuti LK1 tersebut, dilaksanakan *screening* terhadap peserta yaitu pemberian lima materi awal. *Screening* ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal peserta atau calon kader. Adapun pelaksanaan *screening* ini dilakukan satu jam sebelum pelaksanaan LK1 ini. Setelah pelaksanaan *screening* ini calon kader akan menempuh pengaderan pada tahap LK1 yang biasanya dilaksanakan selama tiga hari dengan sembilan materi, seperti di antaranya materi nilai dasar perjuangan (NDP), mahasiswa dan perubahan sosial (MPS), dan manajemen organisasi dan kepemimpinan. Setelah pelaksanaan LK1 ini pada akhir kegiatan akan dilaksanakan kembali uji pengetahuan peserta setelah mengikuti LK1 tersebut. Tindak lanjut dari LK1 ini, peserta yang telah dikukuhkan dan resmi menjadi anggota HMI akan mengikuti Training Revolusi Kesadaran (TRK), yaitu TRK satu sampai TRK delapan yang dilakukan rutin seminggu sekali sebagai tindak lanjut LK1. Selain itu, juga melakukan *follow up* kader dan melibatkan kader dalam Kegiatan HMI. Selanjutnya, kader-kader yang telah memiliki pengetahuan ke-HMI-an dan memenuhi syarat dapat mengikuti pengkaderan tingkat selanjutnya, yaitu LK2 dan LK3. LK2 ini biasanya diselenggarakan oleh cabang-cabang HMI.

Sedangkan pengaderan yang dilakukan KAMMI hampir sama dengan HMI yaitu dilakukan dengan tiga tahapan yaitu Daulah Marhalah (DM) 1, 2, dan 3. K3 mengatakan DM1 merupakan syarat utama bagi calon kader sebelum menjadi anggota resmi KAMMI. Pelaksanaannya biasanya tiga hari dengan materi di ruangan dan pelaksanaan simulasi aksi. Simulasi aksi ini merupakan identitas tersendiri dari KAMMI yang sesuai dengan nama organisasi ini yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Calon kader yang mengikuti pelaksanaan DM1 ini secara penuh atau sebagian besar akan lulus menjadi kader resmi organisasi. Apabila kader yang tidak mengikuti DM1 ini tidak penuh dan atau sebagian kecil materi maka dapat dipertimbangkan oleh panitia. Setelah kelulusan peserta diumumkan pada hari akhir DM1, kemudian peserta yang lulus dikukuhkan menjadi anggota baru KAMMI. Tindak lanjut dari DM1 tersebut adalah adanya Madrasah KAMMI (MK) dan pengkaryaan. MK ini adalah bentuk pemantapan materi tentang keislaman dan ke-KAMMI-an. MK ini terbagi dua yaitu MK klasikal dan MK *grouping*. MK klasikal biasanya dilakukan satu bulan sekali dengan diikuti seluruh kader baru. Sedangkan MK *grouping* dilaksanakan rutin mingguan dengan pembagian kader dalam kelompok-kelompok kecil sebanyak 10 orang dengan mentor-mentor yang telah ditentukan. Adapun pengkaryaan adalah penempatan kader pada kepengurusan, namun sifatnya masih sekedar magang. Selain itu, ada juga *training* kepemimpinan organisasi. Kader yang telah memenuhi syarat dan

mengikuti seleksi yang dilakukan KAMMI Daerah dapat mengikuti DM2 dan DM3.

**3. Tindak lanjut (*follow up*) dari proses pendidikan politik organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap anggota yang telah lulus dalam bidang akademik (alumni)**

Organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI memiliki batas aktif sebagai anggota bagi para kadernya dan akan menjadi alumni dari organisasi tersebut. Dalam konstitusi atau AD/ART organisasi telah diatur tentang keanggotaan, anggota yang telah lulus secara akademik ditambah tiga tahun setelah lulus kemudian setelah itu anggota akan menjadi alumni. Apabila dalam masa tersebut kader melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, otomatis ia masih menjadi kader aktif, bukan alumni. Hal ini cukup menarik untuk dikaji tentang keterkaitan penyelenggaraan pendidikan politik antara HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap kader yang telah lulus atau alumni tersebut. Sebenarnya tidak ada pendidikan politik bagi para alumni dari GMNI komisariat UPI. Biasanya para kader yang sudah lulus tidak perlu diarahkan lagi tapi sudah mengarahkan diri, biasanya memilih organ-organ yang masih berdekatan atau seideologi, seperti gerakan pemuda demokrat, gerakan pemuda marhaenis, forum pemuda marhaenis. Keterkaitan komisariat dengan alumni hanya sebatas pada beban moral. Maksudnya, para alumni sangat menyadari apa yang didapatkan dari kegiatan organisasi, maka para alumni tersebut akan memiliki kesadaran untuk ikut memperhatikan kegiatan komisariat, satu diantaranya dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Adapun bentuk keterkaitan alumni dengan komisariat dalam penyelenggaraan pendidikan politik yaitu diskusi alumni dengan komisariat. Keikutsertaan alumni sangat antusias dalam menyukseskan program pendidikan politik kader di komisariat. Namun, jelasnya pendidikan politik tidak dilaksanakan untuk para alumni, melainkan ada wadah tersendiri bagi para alumni yaitu Persatuan Alumni (PA). Dalam PA ini sama halnya dengan komisariat, yaitu adanya program pendidikan politik ataupun pengalaman politik bagi para alumni.

Begitupun halnya dengan organisasi HMI, alumni tidak terlibat hanya sebatas memberikan dukungan moral dan moril. Tidak ada program pendidikan politik dari komisariat terhadap alumni. Namun para alumni memiliki suatu wadah yaitu Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Adapun keterkaitan alumni dalam penyelenggaraan pendidikan politik di komisariat hanya sebatas koordinasi ataupun menjadi undangan.

Sedangkan yang terjadi di KAMMI sampai saat ini belum memiliki wadah perkumpulan bagi para alumni secara resmi namun kelompok-kelompok tersebut biasa membentuk sendiri dengan didasari ikatan emosional. Sama halnya dengan HMI dan GMNI, tidak ada tindak lanjut dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi alumni. Biasanya para alumni lebih memilih terjun langsung ke dunia kerja, baik itu di instansi pemerintah maupun yang lainnya. Biasanya para alumni ini masuk dalam LSM. Bentuk keterkaitan tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan politik komisariat yaitu menjadi pemateri, bantuan dana, dan dukungan moril, baik dalam pelaksanaan sekolah politik, diskusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya.



#### **4. Hambatan yang dihadapi organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam melaksanakan proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia**

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan politik di HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI ini banyak menghadapi hambatan-hambatan. hambatan yang dihadapi GMNI diantaranya yaitu keterbatasan waktu kader. hambatan tersebut meliputi kesibukan kader dan minat kader. Kesibukan ini banyak terbentur dengan aktivitas akademik kader. Minat kader yang tidak semuanya senang dengan diskusi-diskusi, sehingga kadang sampai tidak terlaksana kegiatan diskusi dan kajian di komisariat. Biasanya faktor utama yang menjadi hambatan tersebut terletak kegiatan akademik kader.

Begitu pula penyelenggaraan pendidikan politik di HMI dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terdapat dalam proses aktualisasi kader dalam membangun sinergitas emosional dalam kepanitian. Selain itu hambatan terletak pada akomodasi pelaksanaan kongres, keterbatasan waktu, dan kesibukan kader. Banyak kader yang sangat antusias terhadap pelaksanaan kongres, namun akomodasi ini sering menjadi hambatan yang paling utama. Selain itu, banyaknya kegiatan komisariat dan sibuknya para kader juga menjadikan penyelenggaraan diskusi, kajian, dan seminar sering terhambat dan bahkan tidak terlaksana. keterbatasan waktu dan masalah finansial yang sering menjadi hambatan. Dalam setiap kegiatan seperti seminar, kongres, diskusi publik, dan bedah buku sering tidak terlaksana karena masalah ini. Masalah yang paling dominan yang dihadapi HMI ini terletak pada kesibukan kader dan keuangan. Organisasi ini bukan organisasi profit sehingga tidak memiliki keuangan yang tetap. Begitupun kader-kader HMI ini bukan hanya aktif di HMI saja, namun banyak juga yang aktif di himpunan jurusan dan dalam bidang akademis sehingga kesibukan kader ini juga menjadi hambatan utamanya.

Tidak jauh berbeda, KAMMI juga memiliki hambatan-hambatan yaitu dalam pelaksanaan diskusi, kajian, dan aksi dihadapkan pada kesibukan pribadi kader dan kesibukan akademik kader. Hambatan pelaksanaan diskusi, kajian, dan aksi terletak pada kesibukan kader tersebut. Namun, dalam pelaksanaan program sekolah politik, hambatan terletak pada SDM pengurus, peserta, dukungan lembaga, finansial, dan publikasi yang kurang. Selain itu, dukungan lembaga dalam perizinan tempat menjadi permasalahan selanjutnya dalam pelaksanaan program tersebut.

#### **5. Solusi yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap hambatan yang dihadapi dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia**

Solusi yang diambil dari hambatan yang dihadapkan pada penyelenggaraan pendidikan politik di GMNI yaitu satu diantaranya pemberian pemahaman pada kader tentang pentingnya pendidikan politik tersebut, siasati dengan pemberian tanggung jawab menjadi kordinator pelaksana. Kemudian, diusahakan kegiatannya

tidak mendadak, dan membangun kedekatan emosioanal. Ketika sudah ada kedekatan akan serasa menjadi saudara, saat ada masalah pun mereka akan terbuka.

Solusi yang yang diambil seperti demikian dianggap sudah tepat dan efektif sehingga kegiatan diskusi dan kajian bisa terlaksana walaupun hari tidak menentu. Karena ketika diberikan tanggung jawab seperti menjadi pelaksana kegiatan maka itulah tanggung jawab dia. Apabila kegiatannya gagal, ia akan menjadi orang gagal. Tidak ada sanksi bagi kegagalan tersebut, namun kita akan mencari solusi bagi orang tersebut dengan memfasilitasinya.

Solusi yang diambil oleh HMI dalam menghadapi hambatan penyelenggaraan pendidikan politik yaitu dengan cara memperbanyak penekanan dalam kajian untuk memberikan kesadaran pada para kader. Kemudian dengan melakukan penyesuaian waktu dalam pelaksanaan diskusi dan kajian. Selanjutnya dengan cara koordinasi dengan para kader untuk menentukan jadwal diskusi dan kajian. Sedangkan dalam penyelenggaraan dalam bentuk seminar atau diskusi publik yang memerlukan dana solusinya yaitu dengan cara menyebar proposal terhadap alumni dan berwirausaha.

Begitu pula KAMMI mengambil langkah-langkah dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Dalam penyelenggaraan sekolah politik yaitu dalam peminjaman tempat tidak terpaku pada satu tempat namun juga mencari tempat cadangan. Apabila tidak bisa terlaksana dalam ruangan, maka dilaksanakan di luar ruangan. Selain itu penambahan panitia, memperbaiki hubungan birokrasi dengan internal kampus, dan wirausaha untuk mendapatkan dana tambahan. Sedangkan dalam pelaksanaan diskusi dan kajian, solusi yang diambil adalah komunikasi antar kader yang baik dan penentuan jadwal yang tepat. Hambatan lain yang terletak pada peserta dilakukan dengan langkah khusus yang KAMMI ambil yaitu mengadakan *door prize* dalam beberapa kegiatan untuk menarik minat peserta.

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **1. Program yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia**

organisasi kemahasiswaan ekstrakampus seperti HMI, KAMMI, dan GMNI khususnya Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi mahasiswa. Hal ini dikarenakan organisasi ekstrakampus ini memiliki identitas cenderung sebagai organisasi politik bagi mahasiswa. Seperti yang diungkapkan Alfatih (2009: 1) bahwa “organisasi ekstra kampus sebagai wadah pengembangan ideologi sekaligus kawah candradimuka menuju pencerdasan politik bangsa”. Masyarakat dalam suatu negara tidak akan terlepas dari suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang menjadi permasalahan tidak semua aturan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan apa yang dirasakan rakyat di lapangan. Maka perlu adanya jembatan perantara antara rakyat dengan pemerintahnya, yaitu di antaranya kalangan mahasiswa ini.

Melalui organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI ini, mahasiswa dapat belajar untuk memahami tentang politik. Hal ini dikarenakan HMI, KAMMI, dan GMNI ini sebagai organisasi kemahasiswaan yang cenderung ke arah perilaku berpolitik. Satu diantara langkah untuk menciptakan mahasiswa yang paham dan melek politik ini adalah melalui pendidikan politik. Dalam penyelenggaraannya, Pidarta (2007:

20) menyebutkan bahwa proses pendidikan terbagi atas 3 bentuk yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Lebih jelas lagi dalam penyelenggaraannya, Djiwandono (Kosasih, 2011: 45-46) menyebutkan jalan yang ditempuh dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu sebagai berikut.

- a) Melalui pendidikan formal meskipun tidak menggunakan istilah pendidikan secara eksplisit.
- b) Melalui pendidikan nonformal, yaitu melalui organisasi kemasyarakatan.
- c) Melalui pendidikan masyarakat dan dalam hubungan ini peranan media massa, baik cetak maupun elektronik tentu sangat membantu.

Penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI adalah satu bentuk pendidikan nonformal. Adapun pendidikan politik seperti diungkapkan Kartono (2009: 64) yaitu sebagai berikut.

Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Perlunya pendidikan politik untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara Indonesia satu diantaranya adalah tingkat partisipasi warga negara terhadap kehidupan negaranya. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi warga negara terhadap negaranya sangatlah diperlukan. Dalam negara demokrasi tidaklah mungkin suatu negara dapat berkembang tanpa adanya partisipasi dari warga negaranya. Pendidikan politik ini adalah satu diantara media pembelajaran utama untuk menciptakan warga negara mau dan mampu berpartisipasi terhadap negaranya. Seorang ahli yaitu hajer dalam buku *political education* dari Robert Brownhill dan Patricia Smart dalam Sadeli, dkk (2009: 19) mengatakan bahwa “pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya”.

Bentuk penyelenggaraan pendidikan politik seperti ini merupakan model pembelajaran pembiasaan sebelum terjun dalam kehidupan bernegara. Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh John S. Braubacher (Suwarno, 2009: 20) yaitu:

Pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, didukung dengan alat (media) yang disusun sedemikian rupa, sehingga pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun program kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan model seperti ini terletak pada kegiatan musyawarah anggota di organisasi seperti Rapat Anggota Komisariat, kongres, dan musyawarah lainnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan politik seperti pada dasarnya kesadaran diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan ungkapan Kartono (2009: 65) yang mengemukakan “Unsur pendidikan dalam pendidikan politik pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri)”.

Perlunya partisipasi warga negara adalah untuk dapat memengaruhi kehidupan negaranya secara bertanggung jawab. Bukan hanya sebatas memengaruhi, namun perlu adanya tanggung jawab sehingga partisipasi tersebut dapat bermakna dan menghasilkan yang lebih baik pula. Sebagai bentuknya seperti melalui pembelajaran pendidikan politik dalam bentuk musyawarah-musyawarah tersebut tercermin dalam hal mengemukakan pendapat, memberikan dan menerima kritikan, serta menyalurkan dan mempertahankan kepentingan yang terbaik bagi organisasi tersebut. Dengan kata lain, hal ini dijadikan sebagai laboratorium demokrasi suatu negara, namun dalam lingkup yang lebih kecil. Di samping itu, pembelajaran pendidikan politik dalam konteks partisipasi juga terletak pada penyelenggaraan kegiatan organisasi untuk memberdayakan seluruh kader dan pengelolaan keuangan organisasi. Dalam kehidupan negara pun seperti demikian, bagaimana langkah yang diambil untuk mengelola keuangan negara dan program apa yang dapat memberdayakan rakyat sehingga dapat tercapai kesejahteraan. Oleh karena itu, pembiasaan dalam kehidupan organisasi seperti ini merupakan modal awal bagi pemahaman kader sehingga dapat dijadikan bekal ketika menjadi warga masyarakat dan negara.

Di samping itu pula, masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat multikultural dengan berbagai latarbelakang, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Keanekaragaman tersebut dapat dengan mudah memicu lahirnya konflik di masyarakat. Hal itu pula yang mendorong perlunya pendidikan politik dari organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI bagi kader organisasi dan mahasiswa secara umum sebelum terjun di masyarakat. Bentuk pendidikan politik seperti ini biasanya terselenggara dalam bentuk diskusi-diskusi dan kajian-kajian tentang isu-isu kemasyarakatan atau dalam organisasi KAMMI adanya program sekolah politik (*politic institute/PI*). Dalam kegiatan ini kader belajar untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat dan berusaha mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut. Hal ini didasari atas ungkapan Katono (2009: 66) yang menyebutkan “pemahaman politik berarti pemahaman konflik”. Perlunya pemahaman politik melalui pendidikan politik dalam organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI ini juga ditujukan agar para kader mampu memiliki keterampilan mengelola konflik. Selanjutnya ditegaskan oleh pendapat Kartono (2009: 67) yang mengatakan “berbuat politik berarti mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik”.

Dari beberapa hal di atas dapat terlihat bahwa pendidikan politik yang diselenggarakan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI memiliki peran yang penting dalam menciptakan warga negara yang mampu bertindak bagi negaranya. Warga negara yang baik memiliki kepedulian yang tinggi terhadap negaranya. Sehingga semua permasalahan yang dihadapi negara akan diselesaikan sehingga tidak berdampak buruk bagi negaranya. Kepedulian tersebut dapat lahir dari adanya pendidikan politik bagi warga negara dan satu diantara sarana pendidikan politik bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yaitu organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI ini. Terlebih UPI adalah basis terbesar penghasil guru di Indonesia, pendidikan politik tersebut akan sangat menunjang dalam kegiatan akademik mahasiswa dan mampu mengajarkan kembali kepada peserta didik yang selanjutnya agar dapat terciptanya warga negara yang baik (*to be a good citizenship*) dan tercapainya tujuan pendidikan politik bagi

generasi muda di Indonesia seperti diungkapkan Kartono (2009: 70) yaitu sebagai berikut.

- 1) Membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik, sadar akan hak dan kewajiban politiknya selaku warga negara, di samping sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang harus terus menerus membangun.
- 2) Membangun orang muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam seluruh sifat watak/karakteristik kepribadian Indonesia (tidak lupa jati dirinya dan tidak mengalami proses alienasi).

## **2. Kurikulum pengaderan HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia**

Organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI merupakan organisasi yang terdiri atas beberapa unsur-unsur penting di antaranya yang paling penting yaitu anggota organisasi atau kader. Tanpa adanya kader tersebut organisasi akan mengalami kekosongan dan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Roda penggerak organisasi tersebut terletak pada kader tersebut. Hal tersebut seperti diungkapkan Winardi (2011: 15) yang mendefinisikan organisasi sebagai berikut.

... sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, di antara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.

Langkah pengaderan yang dilakukan HMI, KAMMI, dan GMNI merupakan langkah untuk memberdayakan mahasiswa sebagai sumber daya organisasi. Pengaderan ini dilakukan bukan hanya sebatas untuk memperbanyak kader, namun juga dilakukan sebagai sarana pelatihan agar kader memiliki pemahaman tentang organisasi yang diikuti dan memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi tersebut. Kaderisasi yang dilakukan HMI, KAMMI, dan GMNI dalam bentuk pelatihan dalam LK, DM, atau PPAB ini terletak pada materi-materi yang diberikan selama berlangsungnya kaderisasi tersebut. Adapun materi-materi tersebut diantaranya tentang manajemen organisasi, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan.

Bukan hanya sifatnya insidental saja, kaderisasi tersebut terus berlangsung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi selanjutnya, seperti materi lanjutan dari LK, DM, ataupun PPAB tersebut. Hal ini tercermin dengan adanya pelaksanaan Training Revolusi Kesadaran (TRK) dan Madrasah KAMMI (MK). Pada tahapan ini merupakan pemantapan atas semua materi yang diberikan pada LK, DM, dan PPAB. Adapun setelah mendapatkan pemahaman tentang organisasi tersebut, kader dapat melakukan kaderisasi pada tahapan selanjutnya seperti LK2 dan LK3 di HMI, DM2 dan DM3 di KAMMI, dan KTD, KTM, dan KTP di GMNI.

Dari hal tersebut tercermin bahwa terus berlangsungnya kaderisasi yang dilakukan organisasi agar pemahaman kader terus meningkat. Selain itu, dari kegiatan kaderisasi tersebut sehingga tercipta ikatan emosional sesama kader, sehingga terciptanya tim yang kokoh dalam organisasi tersebut. Hal ini diungkapkan Sopiah (2008: 49) yang mengatakan bahwa “ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan tim, yaitu seleksi, pelatihan, dan ganjaran”.

### **3. Tindak lanjut (*follow up*) dari proses pendidikan politik organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap anggota yang telah lulus dalam bidang akademik (alumni)**

Organisasi HMI, KAMMI dan GMNI merupakan satu diantara elemen masyarakat yang menjadi produsen penghasil warga negara yang berkualitas. Hal ini didasari atas banyak alumni organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI yang terlihat menonjol dalam lingkungan masyarakat yang ditinggali. Selain itu juga dapat dilihat dari beberapa orang alumni yang manggung sebagai pejabat pemerintah. Semua ini merupakan dampak yang dihasilkan dari pendidikan yang didapatkan alumni selama menjadi anggota aktif dalam organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI.

Pendidikan politik ini sangat penting adanya mengingat perlunya keterampilan interaksi dan komunikasi dalam hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat tidak akan pernah lepas dari adanya tindakan politik sebagai upaya interaksi dan komunikasi politik tersebut. Maka dari hal tersebut, potensi politik yang dimiliki mahasiswa sangat perlu dikembangkan melalui penyelenggaraan pendidikan politik di organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI.

Tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI adalah untuk memberikan pemahaman politik pada mahasiswa UPI sehingga memiliki kesadaran terhadap politik atau dengan kata lain melek politik. Adapun pendidikan politik ini ditujukan selain untuk mahasiswa secara umum, namun lebih utama adalah untuk pengembangan pemahaman politik bagi kader-kader dari organisasi tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan politik merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan organisasi bagi kader-kader organisasi selama masih menjadi anggota aktif dari organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mengatur tentang keanggotaan organisasi. Peraturan ini ditujukan sebagai langkah regenerasi kader agar tidak terjadi kebuntuan kader dalam organisasi. Kemudian dalam aturan ini secara umum dikatakan bahwa setiap kader yang telah lulus dalam bidang akademik dengan jangka waktu yang telah ditentukan secara otomatis tidak menjadi anggota aktif dari organisasi tersebut namun telah menjadi alumni dari organisasi tersebut. Hal ini cukup menarik untuk dikaji tentang penyelenggaraan pendidikan politik dari organisasi terhadap alumni dan keterkaitan alumni dalam penyelenggaraan pendidikan politik tersebut..

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata tidak ditemukan adanya penyelenggaraan pendidikan politik bagi alumni tersebut dari organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI. Namun, ditemukan adanya keterkaitan penyelenggaraan pendidikan politik organisasi dengan alumni. Keterkaitan tersebut hanya pada beban moral yang diterima oleh alumni, sehingga berdampak pada kesadaran alumni untuk membantu organisasi dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi kader. Keterkaitan tersebut meliputi bantuan dalam pendanaan kegiatan dan pemberian materi dan pengalaman dari alumni bagi para kader. Adapun bentuknya dapat terwujud dalam diskusi dan seminar dengan pemateri dari para alumni serta adanya *roadshow* alumni sebagai upaya untuk

memberikan motivasi bagi para kader tentang pengalaman yang diterima selama mengikuti pendidikan politik di organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI.

Adapun yang melatarbelakangi tidak adanya pendidikan politik bagi alumni adalah luas ruang lingkup alumni yang telah menyebar di masyarakat sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pendidikan politik tersebut. Selain itu, adanya wadah perkumpulan bagi para alumni yaitu suatu ikatan alumni dan lembaga-lembaga yang diikuti alumni dengan program-programnya sehingga dikhawatirkan akan terjadi benturan dengan program ikatan alumni tersebut. Dari hal tersebut maka lahir pandangan bahwa alumni tidak memerlukan pendidikan politik dari organisasi karena alumni sudah memiliki bekal pendidikan politik dari organisasi sehingga alumni dapat menentukan sendiri sikapnya terhadap pendidikan politik tersebut dan mengaktualisasikan manfaat yang didapatkan dari organisasi terhadap lingkungannya. Adapun pendidikan politik merupakan bekal sekaligus hasil yang diterima alumni atas semua partisipasi yang dilakukan terhadap organisasi selama menjadi kader aktif. Hal ini sejalan dengan tahapan-tahapan dalam partisipasi politik seperti yang diungkapkan Tjokroamidjojo dalam Arif (2009: 48-49) meliputi beberapa hal diantaranya sebagai berikut.

- 1) partisipasi atau keterlibatan langsung dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah,
- 2) keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan,
- 3) keterlibatan dalam memetik dan manfaat secara berkeadilan

Dari pandangan tersebut dapat terlihat, bahwa tahapan akhir dari partisipasi yang dilakukan adalah keterlibatan memetik manfaat. Maka dalam kaitannya pendidikan politik organisasi dengan alumni terletak pada hasil yang diambil dari segala tingkah laku alumni selama berpartisipasi sebagai kader organisasi. Jadi, sudah seharusnya para alumni untuk meaktualisasikan pendidikan politik dalam kehidupan masyarakat. Adapun bentuk-bentuknya dapat terlihat dari banyaknya alumni organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI yang bekerja pada instansi pemerintahan, walaupun banyak pula yang menjadi pengajar di lingkungan masyarakatnya. Namun yang lebih utama dari hal tersebut, alumni harus bisa berpartisipasi secara bertanggung jawab terhadap negara dan melalui posisi yang dimiliki alumni dalam masyarakat maka sudah seharusnya mampu merubah masyarakat menjadi partisipan terhadap negaranya. Adapun partisipasi seperti diungkapkan Huntington dalam Wuryan dan Syifullah (2008:70) menyebutkan bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud warganegara preman di sini adalah sebagai perorangan-perorangan sebagai warganegara yang mempunyai peranan-peranan tertentu”.

#### **4. Hambatan yang dihadapi organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam melaksanakan proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia**

Suatu organisasi merupakan kumpulan manusia sebagai elemen atau unsur utama dalam organisasi yang saling sinergis dengan unsur lainnya. Kesinergisan tersebut akan menyebabkan pencapaian sasaran atau tujuan lebih berhasil. Apabila satu diantara dari elemen tersebut mengalami gangguan, akan berdampak pada kondisi atau sinergitas seluruh elemen yang berujung pada kebuntuan dalam mencapai sasaran. Oleh karena itu, perlunya pengorganisasian dari semua elemen tersebut agar berjalan dengan sinergis. Namun, dalam perjalanannya sering dihadapkan pada hambatan-hambatan sehingga sering menjadi penghambat semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka, dalam hal ini diperlukan partisipasi dari semua anggota organisasi dapat meminimalisir hambatan tersebut sehingga kegiatan dalam organisasi dapat dijalankan menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Begitu pun dalam penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI pasti dihadapkan pada hambatan-hambatan yang memungkinkan berdampak pada tidak terlaksananya program pendidikan politik. Pada prinsipnya, hambatan yang dihadapi organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam menyelenggarakan pendidikan politik terletak pada keterbatasan waktu kader yang terbentur dengan kegiatan akademik kader.

Di samping itu, hambatan juga terletak pada kesadaran kader tentang pentingnya pendidikan politik. Hal ini dikarenakan beraneka ragamnya tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing kader ketika masuk organisasi dan tidak sedikit pula dari para kader yang tidak berminat pada kegiatan politik. Begitupun dalam pelaksanaan sekolah politik yang diselenggarakan KAMMI, satu diantara kendala utama adalah terletak pada peserta dari kegiatan tersebut. Peserta kegiatan ini bukan hanya kader KAMMI namun juga mahasiswa nonorganisasi. Dalam setiap pertemuan intensitas peserta terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh dua karakter mahasiswa yaitu mengetahui adanya kegiatan namun tidak ingin mengikuti kegiatan tersebut dan memang mahasiswa yang tidak mengetahui dan tidak ingin mengikuti kegiatan. Ini menjadi satu diantara indikator bahwa kesadaran dan minat politik dari kalangan mahasiswa yang terus mengalami penurunan.

Selain kurangnya kesadaran politik dari mahasiswa, juga adanya sikap ketidakberpihakan mahasiswa terhadap adanya politik. Tidak sedikit mahasiswa yang berpandangan negatif terhadap politik. Hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Hal tersebut senada dengan pendapat Kartono (2009: 72-73) yang mengatakan kesulitan penyelenggaraan pendidikan politik yaitu antara lain sebagai berikut.

- a. Amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam iklim penindasan, penghisapan, dan penjajahan, sehingga mereka menjadi terbiasa hidup dalam serba kekurangan dan ketertinggalan. Sulit mendorong mereka ke arah konsientisasi diri mengungkapkan segala problema yang tengah dialami.
- b. Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usah-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik –yang dianggap palsu dan meninabobokan rakyat belaka-; sulit pula untuk mengajak mereka untuk berpikir lain



dengan nalar jernih. Bahkan banyak di antara massa rakyat yang takut pada kemerdekaan (dirinya).

- c. Dengan latar pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan sulit memahami kompleksitas situasi sosial dan politik di sekitar dirinya.
- d. Para penguasa yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya pendidikan politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan pelestarian rezimnya. Partisipasi aktif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuasaan organ-organ ketatanegaraan.

##### **5. Solusi yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI terhadap hambatan yang dihadapi dalam proses pendidikan politik sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik warga negara Indonesia**

Dalam penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI, banyaknya hambatan yang dihadapi organisasi tersebut harus dihadapi dan dicarikan solusi atas hambatan-hambatan tersebut. Mengingat pentingnya keberlangsungan pendidikan politik bagi kader dan mahasiswa maka permasalahan yang dihadapi tidak seharusnya menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya pendidikan politik dalam organisasi tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hambatan yang dihadapi organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan politik bisa dikatakan sebagai hambatan pokok yang sangat mendasar. Namun bukan berarti tidak ada solusi atas hambatan tersebut. Dibutuhkan partisipasi dari semua kader organisasi agar dapat menghasilkan solusi dari hambatan tersebut. Adapun partisipasi kader dalam kehidupan organisasi dapat tercermin pada tahapan-tahapan dalam partisipasi politik seperti yang diungkapkan Tjokroamidjojo dalam Arif (2009: 48-49) sebagai berikut.

- 1) Partipasi atau keterlibatan langsung dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijakan yang dilakukan,
- 2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan,
- 3) Keterlibatan dalam memetik dan manfaat secara berkeadilan.

Pada tahapan pertama, semua kader perlu ikut andil dalam penentuan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Kemudian, dalam perjalanannya hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan politik harus menjadi beban dan tanggung jawab bersama agar semua kader ikut mencari solusi atas hambatan tersebut sebelum dapat memetik hasil dari partisipasi kader terhadap organisasi. Pada dasarnya, perlu adanya pemikiran bersama untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan politik tersebut sehingga dapat menghasilkan solusi yang efektif agar pendidikan politik tersebut dapat terlaksana dalam organisasi.

Solusi yang diambil untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik dalam organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI yaitu memberikan pemahaman terhadap kader tentang perlunya kesadaran dalam berpolitik. Langkah yang diambil untuk melakukan hal ini adalah dengan pendekatan emosional terhadap kader-kader tersebut. Langkah seperti ini memang

tidak terlalu efektif, maka perlu adanya tindak lanjut seperti memberikan tanggung jawab pada kader-kader tersebut.

Langkah kemudian yang dapat diambil adalah dengan pemberian motivasi bagi para kader. Pemberian motivasi seperti ini dapat dilakukan melalui diskusi, sharing, pemutar video, dan membaca buku yang berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut dapat membangun rasa kepedulian kader atas lingkungan sosialnya sehingga memiliki hasrat untuk dapat merubah keadaan masyarakat. Dari hal tersebut maka dapat ditindak lanjuti dengan penyelenggaraan pendidikan politik yang bertemakan tentang resolusi konflik atau analisis sosial.

Langkah-langkah tersebut juga dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap mahasiswa nonorganisasi tentang pentingnya pendidikan politik sehingga dapat terwujudnya pemahaman pentingnya partisipasi warga negara terhadap kehidupan negaranya. Dalam hal inilah pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa agar mampu memerankan perannya dalam masyarakat.

Selanjutnya hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan politik juga terletak dalam hal pendanaan organisasi. Setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi sering sekali terbentur dengan masalah dana, sebab semua kegiatan organisasi sering membutuhkan dana dalam penyelenggaraannya. Begitu pula dalam hal ini perlu adanya penanganan agar tidak berdampak pada tidak terlaksananya program pendidikan politik. Organisasi HMI, KAMMI, dan GMI Komisariat ini tidak memiliki sumber dana yang tetap, maka diperlukan keterampilan kader dalam mencari dana untuk pelaksanaan program. Adapun langkah yang dilakukan sebagai solusi atas hambatan seperti ini adalah melalui wirausaha yang dilakukan kader. Mengingat pentingnya keterampilan wirausaha ini, maka program wirausaha merupakan suatu pelatihan yang dilakukan dalam organisasi. Selain wirausaha tersebut, langkah yang dilakukan organisasi ini adalah melalui penyebaran proposal terhadap alumni dan bekerjasama dengan instansi pemerintahan untuk menyelenggarakan pendidikan politik tersebut.

Kunci utama dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan politik adalah adanya kerja sama antar sesama kader organisasi. Maka sangat diperlukan partisipasi dari semua kader organisasi, karena partisipasi kader akan sangat mempengaruhi segala bentuk tindakan yang diambil oleh organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI tersebut.

## **SIMPULAN**

Pendidikan politik merupakan satu diantara elemen pendidikan yang penting bagi warga negara. Pendidikan politik dapat berlangsung pada pendidikan nonformal seperti organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI. Penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi ini meliputi diskusi, kajian isu-isu sosial, dan pembiasaan berpartisipasi terhadap organisasi, seperti dalam kegiatan musyawarah anggota organisasi. Pendidikan politik ini sangat ditunjang oleh pola pengkaderan yang dilakukan organisasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Adapun pendidikan politik ini hanya ditujukan kepada kader-kader organisasi yang masih aktif dan mahasiswa UPI secara umum, maka tidak ada program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh organisasi bagi para alumni. Dalam hal ini, alumni lebih cenderung pada aplikasi dari pendidikan politik yang didapatkan dari organisasi. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan politik ini

sering dihadapkan pada hambatan-hambatan seperti kesibukan kader dengan kegiatan akademik, keterbatasan dana organisasi, dan kurangnya dukungan lembaga terhadap kegiatan organisasi ekstrakampus ini. Namun, agar pendidikan politik ini dapat terselenggara perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan sebagai solusi atas hambatan tersebut, seperti di antaranya penentuan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan akademik kader, berwirausaha dalam pemenuhan kebutuhan dana organisasi, dan memperbaiki hubungan dengan pihak lembaga. Dari kesimpulan tersebut dapat ditarik sebuah inti sari bahwa organisasi kemahasiswaan ekstrakampus seperti HMI, KAMMI, dan GMNI dapat dikatakan sebagai sebuah miniatur dari suatu negara, maka organisasi tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran politik mahasiswa sehingga mampu menjadi pelaku politik dan partisipan yang bertanggung jawab terhadap negaranya.

## DAFTAR REFERENSI

### Sumber buku

- Budiardjo, M. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta: PT Gramedia
- Budiardjo, M. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, C. 2008. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Etzioni, A. 1985. *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Erea Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harrison, L. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta : Kencana.
- Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. 2009. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Mandar Maju.
- Kencana, I. 2005. *Filasafat Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, S. 2009. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pidarta, M. 2007. *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rinek Cipta.
- Prasetyantoko, dkk. 2001. *Gerakan Mahasiswa Demokrasi di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Rohman, A. Dkk. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang : Program Sekolah Demokrasi bekerjasama dengan Averroes Press.
- Rush, M dan Phillip Althoff. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sadeli, Elly H, dkk. 2009. *Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart*. Bandung: Kencana Utama.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: CV ANDI.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.
- Suhelmi, A. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Sukardjo, M. Dan Ukim Komarudin. 2009. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suwarno, W. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syaripudin, T. 2008. *Landasan Pendidikan*. Bandung: Percikan Ilmu.
- Wibowo. 2011. *Budaya Organisasi Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Winardi. 2011. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wuryan, S. dan Syaifulloh. 2008. *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.

#### **Sumber internet**

- Alfatih, F.N. (2009). *Organisasi EkstraKampus Menuju Pendewasaan Politik*. [Online].  
Tersedia:<http://fajaralayyubi.wordpress.com/2009/08/23/organisasi-ekstra-kampus-menuju-pendewasaan-politik/>
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi [Online]. Tersedia: <http://dikti.go.id/Archive2007/OrgMhs.html>
- Nasution, M. A. 2011. *Peranan Mahasiswa dalam Peradaban Indonesia*. [Online]. Tersedia:<http://www.detiknews.com/read/2011/06/20/120017/1663821/471/peranan-mahasiswa-dalam-peradaban-indonesia>
- Purnama, G. Y.(2008). *Peran Fungsi dan Posisi Mahasiswa*. [Online]. Tersedia:<http://geowana.wordpress.com/2008/08/10/peran-fungsi-posisi-mahasiswa/>
- Ressay.(2009). *Berpoligami dengan Organisasi Intra dan Ekstrakampus* [Online]. Tersedia:<http://ressay.wordpress.com/2009/11/23/berpoligami-dengan-organisasi-intra-dan-ekstra-kampus/> (Berpoligami dengan Organisasi Intra dan Ekstra Kampus
- Setiawan, A. (2011). *Organisasi Kemahasiswaan Intrakampus*. [Online]. Tersedia:<http://cerkul.blogspot.com/2011/09/organisasi-kemahasiswaan-intra-kampus.html> Organisasi kemahasiswaan intra kampus
- Sumarno, A. (2011) *Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wahana untuk Membangun Karakter Pemimpin*. [online]. Tersedia: <http://blog.elearning.unesa.ac.id/alim-sumarno/organisasi-kemahasiswaan-sebagai-wahana-untuk-membangun-karakter-pemimpin>
- Wikipedia. (2011). *Organisasi Mahasiswa di Indonesia*. [Online]. Tersedia:[http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_mahasiswa\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_mahasiswa_di_Indonesia) (Organisasi mahasiswa di Indonesia)
- Wikipedia. (2012). *Perguruan Tinggi*. [Online]. Tersedia: [http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan\\_tinggi](http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi)

#### **Sumber dokumen**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

#### **Sumber skripsi**

- Kosasih. 2011. *Peran Organisasi Kemahasiswaan sebagai Laboratorium Pendidikan Politik Mahasiswa*. Skripsi Sarjana pada FPIPS UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Mubarok, A. I. 2008. *Pengaruh Pendidikan Politik di Organisasi Kemahasiswaan terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (Studi Deskriptif terhadap Mahasiswa GMNI dan HMI di UPI Bandung)*. Skripsi Sarjana pada FPIPS UPI Bandung : Tidak diterbitkan.